



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERY SUPRIYONO
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 10491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.930.000.000

1. Tanah Seluas 4821 m2 di PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/270 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 212 m2 di PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/49 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 282 m2 di PONOROGO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KRISTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 366.849.308

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.517.349.308

III. HUTANG Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.517.349.308

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.